**BAB V. ANALISIS FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN RPJMD**

* 1. **Analisis Faktor Pendorong**
     1. **Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat Capaian Kinerja Pembangunan Misi 1.**

Terkait misi 1, pada prinsipnya terdapat 2 tujuan dan 6 sasaran yang hendak dicapai melalui 23 program yang dilaksanakan oleh 8 perangkat daerah. Dua tujuan tersebut yakni *pertama* mewujudkan masyarakat yang berkarakter, berakhlak mulia dan berdaya saing dengan indikator indeks pembangunan manusia; *kedua*, mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan indikator tingkat kemiskinan.

Adapun 6 sasaran sebagaimana dimaksud yakni *pertama*, meningkatnya pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan di masyarakat dengan indikator Indeks Demokrasi Indonesia; kedua, meningkatnya taraf pendidikan masyarakat dengan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah; *ketiga*, meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat dengan indikator meningkatnya gizi dan kesehatan masyarakat; *keempat*, meningkatnya partisipasi aktif perempuan; *kelima*, meningkatnya kewirausahaan dan prestasi pemuda; dan *keenam*, meningkatnya daya saing tenaga kerja.

Delapan perangkat daerah terkait yang terlibat dalam mewujudkan misi, tujuan dan sasaran tersebut yakni Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Berkenaan dengan faktor pendorong capaian kinerja pembangunan misi 1 dapat terlihat pada Tabel di bawah ini

| **Misi** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Faktor** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pendorong** | **Penghambat** |
| Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda dan penyandang Disabilitas | 1. Mewujudkan masyarakat yang berkarakter, berakhlak mulia dan berdaya saing dengan indikator indeks pembangunan manusia | 1. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan di masyarakat dengan indikator Indeks Demokrasi Indonesia | Faktor Pendorong secara Internal meliputi :   1. Komitmen alokasi anggaran/pembiayaan dari pemerintah provinsi untuk memprioritaskan program pembangunan strategis yang memiliki daya ungkit 2. Ketersediaan SDM di lingkup SKPD dan institusi pemerintah serta institusi mitra yang memenuhi kualifikasi kompetensi untuk mendukung pencapaian misi pembangunan 1; 3. Sudah terbangun mekanisme komunikasi - Koordinasi antar SKPD dan pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan program pembangunan yang telah direncanakan 4. Sudah terbangun struktur organisasi SKPD yang proporsional untuk mengimplementasikan program pembangunan yang direncanakan   Faktor pendorong secara Eksternal, meliputi:   1. Arah kebijakan nasional dan global yang memprioritaskan peningkatan kompetensi SDM dalam peta jalan pengembangannya 2. Teknologi informasi dan komputer yang berkembang semakin mudah diakses masyarakat guna mendukung akselerasi peningkatan kualitas SDM | Faktor Penghambat Pencapaian Sasaran 1:   * 1. Terdapat kegiatan yang berjalan tidak optimal karena waktu pelaksanaannya bertepatan dengan periode libur sekolah dan agenda kegiatan pendidikan formal (contoh :penerimaan siswa baru perguruan tinggi);   2. Belum dilakukan program pendidikan politik yang secara spesifik bertujuan menyasar kelompok pemilih pemula   3. Salah satu program yang mendukung pada sasaran 1 tidak dilaksanakan. Program dan kegiatan terkait pengembangan nilai – nilai keagamaan tidak terlaksana. Tidak terdapat data dan atau informasi yang menjelaskan penyebab terhambatnya pelaksanaan kegiatan dan program tersebut.   4. Konteks budaya local masih belum ditentukan secara spesifik |
|  | 1. Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat dengan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah | Faktor Pendorong secara Internal meliputi :   1. Komitmen alokasi anggaran/pembiayaan dari pemerintah provinsi untuk memprioritaskan program pembangunan strategis yang memiliki daya ungkit 2. Ketersediaan SDM di lingkup SKPD dan institusi pemerintah serta institusi mitra yang memenuhi kualifikasi kompetensi untuk mendukung pencapaian misi pembangunan 1; 3. Sudah terbangun mekanisme komunikasi - Koordinasi antar SKPD dan pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan program pembangunan yang telah direncanakan 4. Sudah terbangun struktur organisasi SKPD yang proporsional untuk mengimplementasikan program pembangunan yang direncanakan   Faktor pendorong secara Eksternal, meliputi:   1. Arah kebijakan nasional dan global yang memprioritaskan peningkatan kompetensi SDM dalam peta jalan pengembangannya 2. Teknologi informasi dan komputer yang berkembang semakin mudah diakses masyarakat guna mendukung akselerasi peningkatan kualitas SDM | Faktor penghambat Sasaran 2 :   1. Program dan kegiatan untuk pengembangan sekolah kejuruan tidak terlaksana sehingga tidak bias dilakukan evaluasi. 2. Sekolah pelaksana program belum menerima pelimpahan wewenang secara formal (Surat keputusan penunjukan pelaksana program) untuk melaksanakan program tersebut. 3. Kegiatan/event tingkat nasional didasarkan pada penjadwalan yang dilakukan oleh Kemendikbud. 4. Diperlukan waktu untuk melakukan review APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) dalam setiap pembayaran tahapan kegiatan. 5. Rendahnya ketersediaan tenaga guru pengganti selama guru yang bersangkutan mengikuti pelatihan peningkatan Kompetensi PTK. 6. Organisasi pelaksana program terlambat menerima pelimpahan kewenangan formal untuk melaksanakan program sehingga berakibat keterlambatan dalam melaksanakan program tersebut (Badan pengelola beasiswa baru menerima penunjukan pada bulan Juli 2019). 7. Organisasi pelaksana program terlambat menerima pelimpahan kewenangan formal untuk melaksanakan program sehingga berakibat keterlambatan dalam melaksanakan program tersebut (Badan pengelola beasiswa baru menerima penunjukan pada bulan Juli 2019). 8. Program dan kegiatan terkait penyelenggaraan pendidikan jarak jauh tidak terlaksana. 9. Kegiatan/event tingkat nasional didasarkan pada penjadwalan yang dilakukan oleh Kemendikbud. 10. Komitmen penentu kebijakan belum bersifat komprehensif, masih bersifat parsial, sehingga pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur pada Kabupaten Kota Layak Anak belum sepenuhnya sinkron dengan kebutuhan. 11. Penyalahgunaan pemanfaatan ruang terbuka hijau/taman oleh sebagian warga untuk kegiatan yang tidak relevan sehingga tidak mendukung penanaman nilai dan proses tumbuh kembang anak. 12. Masih kasus perkawinan usia dini/anak yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan kemiskinan sehingga menghambat program perlindungan dan pemenuhan hak anak. 13. Akses (ketersediaan dan keterjangkauan) layanan perpustakaan masih terbatas karena berada di pusat kota dan jauh dari wilayah pedesaan. Di sisi lain, sarana dan prasarana teknologi informasi untuk menjangkau layanan perpustakaan dalam jaringan (online) bagi masyarakat di wilayah pedesaan juga belum tersedia secara memadai. |
|  | 1. Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat dengan indikator meningkatnya gizi dan kesehatan masyarakat | Faktor Pendorong secara Internal meliputi :   1. Komitmen alokasi anggaran/pembiayaan dari pemerintah provinsi untuk memprioritaskan program pembangunan strategis yang memiliki daya ungkit 2. Ketersediaan SDM di lingkup SKPD dan institusi pemerintah serta institusi mitra yang memenuhi kualifikasi kompetensi untuk mendukung pencapaian misi pembangunan 1; 3. Sudah terbangun mekanisme komunikasi - Koordinasi antar SKPD dan pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan program pembangunan yang telah direncanakan 4. Sudah terbangun struktur organisasi SKPD yang proporsional untuk mengimplementasikan program pembangunan yang direncanakan   Faktor pendorong secara Eksternal, meliputi:   1. Arah kebijakan nasional dan global yang memprioritaskan peningkatan kompetensi SDM dalam peta jalan pengembangannya 2. Teknologi informasi dan komputer yang berkembang semakin mudah diakses masyarakat guna mendukung akselerasi peningkatan kualitas SDM | Faktor penghambat pencapaian sasaran 3:   1. Indikator yang belum secara khusus mengarah pada jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya. 2. Beberapa kegiatan bukan merupakan priorittas untuk mendukung pencapaian target program yang ingin dicapai. 3. Realisasi program bergantung pada data dan usulan yang disampaikan oleh Dinas Sosial. 4. Realisasi program menunggu Peraturan Gubernur terkait data sasaran masyarakat miskin dan kurang mampu yang menerima JKN. |
|  | 1. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan indikator tingkat kemiskinan. | 1. Meningkatnya partisipasi aktif perempuan | Faktor Pendorong secara Internal meliputi :   1. Komitmen alokasi anggaran/pembiayaan dari pemerintah provinsi untuk memprioritaskan program pembangunan strategis yang memiliki daya ungkit 2. Ketersediaan SDM di lingkup SKPD dan institusi pemerintah serta institusi mitra yang memenuhi kualifikasi kompetensi untuk mendukung pencapaian misi pembangunan 1; 3. Sudah terbangun mekanisme komunikasi - Koordinasi antar SKPD dan pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan program pembangunan yang telah direncanakan 4. Sudah terbangun struktur organisasi SKPD yang proporsional untuk mengimplementasikan program pembangunan yang direncanakan   Faktor pendorong secara Eksternal, meliputi:   1. Arah kebijakan nasional dan global yang memprioritaskan peningkatan kompetensi SDM dalam peta jalan pengembangannya 2. Teknologi informasi dan komputer yang berkembang semakin mudah diakses masyarakat guna mendukung akselerasi peningkatan kualitas SDM | Faktor penghambat pencapaian sasaran 4 :   * 1. Belum adanya pendampingan bagi pelaku usaha dalam fasilitasi akses pasar, pemupukan modal dan pengembangan kreatifitas untuk peningkatan daya saing usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh kelompok perempuan   2. Program dan kegiatan terkait penguatan kelembagaan perempuan dan anak tidak terlaksana.   3. Belum adanya *base data* masyarakat yang tergolong dalam kemiskinan yang menyebabkan realisasi program penanggulangan kemiskinan bidang kesejahteraan social dan pembinaan penyandang cacat dan trauma yang menyebabkan pencapaian program tidak sesuai dengan target yang diprogramkan |
|  |  | 1. Meningkatnya kewirausahaan dan prestasi pemuda | Faktor Pendorong secara Internal meliputi :   1. Komitmen alokasi anggaran/pembiayaan dari pemerintah provinsi untuk memprioritaskan program pembangunan strategis yang memiliki daya ungkit 2. Ketersediaan SDM di lingkup SKPD dan institusi pemerintah serta institusi mitra yang memenuhi kualifikasi kompetensi untuk mendukung pencapaian misi pembangunan 1; 3. Sudah terbangun mekanisme komunikasi - Koordinasi antar SKPD dan pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan program pembangunan yang telah direncanakan 4. Sudah terbangun struktur organisasi SKPD yang proporsional untuk mengimplementasikan program pembangunan yang direncanakan   Faktor pendorong secara Eksternal, meliputi:   1. Arah kebijakan nasional dan global yang memprioritaskan peningkatan kompetensi SDM dalam peta jalan pengembangannya 2. Teknologi informasi dan komputer yang berkembang semakin mudah diakses masyarakat guna mendukung akselerasi peningkatan kualitas SDM | Faktor penghambat pencapaian sasaran 5:   * 1. Gagalnya keterlibatan Kaltim dalam event dan multi event yang direncanakan dilaksanakan pada tanggal 10-18 Oktober oleh karna pembatalan tuan rumah Papua.   2. Jadwal pelaksanaan mengikuti agenda kegiatan dari institusi pusat sehingga institusi daerah hanya bersifat menunggu   3. Proses penetapan standarisasi infrastruktur olahraga belum selesai.   4. Program dan kegiatan terkait peningkatan upaya kewirausahaan dan kecapakan hidup pemuda tidak terlaksana. |
|  |  | 1. Meningkatnya daya saing tenaga kerja | Faktor Pendorong secara Internal meliputi :   1. Komitmen alokasi anggaran/pembiayaan dari pemerintah provinsi untuk memprioritaskan program pembangunan strategis yang memiliki daya ungkit 2. Ketersediaan SDM di lingkup SKPD dan institusi pemerintah serta institusi mitra yang memenuhi kualifikasi kompetensi untuk mendukung pencapaian misi pembangunan 1; 3. Sudah terbangun mekanisme komunikasi - Koordinasi antar SKPD dan pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan program pembangunan yang telah direncanakan 4. Sudah terbangun struktur organisasi SKPD yang proporsional untuk mengimplementasikan program pembangunan yang direncanakan   Faktor pendorong secara Eksternal, meliputi:   1. Arah kebijakan nasional dan global yang memprioritaskan peningkatan kompetensi SDM dalam peta jalan pengembangannya 2. Teknologi informasi dan komputer yang berkembang semakin mudah diakses masyarakat guna mendukung akselerasi peningkatan kualitas SDM | Faktor penghambat pencapaian sasaran 6 :   1. Pendekatan pendidikan vokasional belum menjadi prioritas program untuk meningkatkan kompetensi SDM yang akan memasuki pasar tenaga kerja 2. Keterbatasan perangkat lunak dalam mendukung pelatihan/pendidikan vokasi yang dilaksanakan untuk meningkatkan daya saing SDM yang akan memasuki pasar tenaga kerja ( contoh : desain kurikulum, modul belajar, sistem sertifikasi) 3. Keterbatasan perangkat (keras/ sarana dan prasarana) institusi penyelenggara pendidikan / pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja |

* + 1. **Analisis Faktor Pendorong Capaian Kinerja Pembangunan Misi 2.**

Terkait misi 2, pada prinsipnya terdapat 2 tujuan dan 11 sasaran yang hendak dicapai melalui 26 program yang dilaksanakan oleh 10 perangkat daerah. Dua tujuan tersebut yakni *pertama* Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan; *kedua*, Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan. Terdapat 11 sasaran pada misi 2 yaitu Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UMKM, meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan, meningkatnya kontribusi sektor parwisata terhadap perekonomian daerah, meningkatnya kontribusi sektor perindustrian terhadap perekonomian daerah, meningkatnya realisasi investasi, meningkatnya kontribusi sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap perekonomian daerah, meningkatnya kontribusi sektor peternakan terhadap perekonomian daerah, meningkatnya kontribusi sektor perkebunan terhadap perekonomian daerah, meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian daerah, meningkatnya kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian daerah, dan meningkatnya pendanaan pembangunan daerah. Terdapat 10 SKPD yang terlibat pada misi 2 ini yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa; Dinas Pariwisata ; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; Dinas Perkebunan; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Kehutanan; dan Badan Pendapatan Daerah. Berkenaan dengan faktor pendorong capaian kinerja pembangunan misi 2 dapat terlihat pada Tabel di bawah ini

| **Misi** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Faktor** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pendorong** | **Penghambat** |
| Misi 2: Berdaulat dalam Pemberdayaaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi | 1. Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan | 1. Meningkatnya Usaha Ekonomi Koperasi Dan UMKM | Faktor Pendorong secara Internal meliputi :   1. Disusunnya RPJMD Berdasarkan Program Prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim” Berani untuk Kaltim Berdaulat” sebagai acuan dana rah pembangunan daerah; 2. Adanya kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memfasilitasi dan mendorong pelaku usaha kecil dan menengah serta koperasi ikut dalam pembangunan ekonomi daerah; 3. Alokasi anggaran/pembiayaan yang bersumber dari APBD untuk memprioritaskan program pembangunan strategis sesuai RPJMD yang memiliki daya ungkit; 4. Kesesuaian jadwal dan ketentuan penyusunan perencanaan semua program dapat berjalan sesuai waktunya; 5. Ketersediaan SDM di lingkup SKPD dan institusi pemerintah serta institusi mitra yang memenuhi kualifikasi kompetensi untuk mendukung pencapaian misi 2; 6. Manajemen pembangunan provinsi Kaltim dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi berdasarkan sistem informasi yang terintegrasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Tim Anggaran Pendapatan Daerah; 7. Sudah terbangun mekanisme komunikasi - Koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengimplementasikan program pembangunan yang telah direncanakan setiap periodik; 8. Pemerintah Provinsi menyusun rencana pengembangan kawasan industri sebagai bagian pembangunan perindustrian di Kaltim   Faktor pendorong secara Eksternal, meliputi:   1. Kesesuaian Arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan global yang bertujuan meningkatkan PDRB berdasarkan pemanfaatan potensi sumber daya alam berkelanjutan dan terbarukan 2. Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan produksi dan potensi sumber daya alam yang melimpah sehingga memungkinkan pengembangan ekonomi ke arah *economic green* 3. Kondusifitas daerah sebagai upaya mendatangkan iklim investasi yang besar di Kalimantan Timur 4. Keputusan penempatan lokasi Ibu kota negara yang baru dari pemerintah pusat merupakan salah satu pendorong kegiatan ekonomi di Kalimantan Timur 5. Keberadaan jalur laut dan pelabuhan ekspor di Kalimantan Timur mendorong pengembangan aktifitas produksi sumber daya alam 6. Peran masyarakat pedesaan di Kalimantan Timur yang kental nuansa budaya dan adat istiadat membantu dalam proses pembangunan secara berkelanjutan 7. Potensi keadaan alam di Kalimantan Timur yang sangat bervariasi mulai dari keanekaragaman hayati, hutan, sungai, danau, bukit, pegunungan hingga pesisir laut yang bisa menjadi obyek pariwisata andalan daerah 8. Adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan destinasi pariwisata di Kalimantan Timur | Faktor Penghambat Pencapaian Sasaran 7:   1. Program tidak dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 |
|  | 1. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | Faktor Pendorong secara Internal meliputi :   1. Disusunnya RPJMD Berdasarkan Program Prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim” Berani untuk Kaltim Berdaulat” sebagai acuan dana rah pembangunan daerah; 2. Adanya kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memfasilitasi dan mendorong pelaku usaha kecil dan menengah serta koperasi ikut dalam pembangunan ekonomi daerah; 3. Alokasi anggaran/pembiayaan yang bersumber dari APBD untuk memprioritaskan program pembangunan strategis sesuai RPJMD yang memiliki daya ungkit; 4. Kesesuaian jadwal dan ketentuan penyusunan perencanaan semua program dapat berjalan sesuai waktunya; 5. Ketersediaan SDM di lingkup SKPD dan institusi pemerintah serta institusi mitra yang memenuhi kualifikasi kompetensi untuk mendukung pencapaian misi 2; 6. Manajemen pembangunan provinsi Kaltim dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi berdasarkan sistem informasi yang terintegrasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Tim Anggaran Pendapatan Daerah; 7. Sudah terbangun mekanisme komunikasi - Koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengimplementasikan program pembangunan yang telah direncanakan setiap periodik; 8. Pemerintah Provinsi menyusun rencana pengembangan kawasan industri sebagai bagian pembangunan perindustrian di Kaltim   Faktor pendorong secara Eksternal, meliputi:   1. Kesesuaian Arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan global yang bertujuan meningkatkan PDRB berdasarkan pemanfaatan potensi sumber daya alam berkelanjutan dan terbarukan 2. Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan produksi dan potensi sumber daya alam yang melimpah sehingga memungkinkan pengembangan ekonomi ke arah *economic green* 3. Kondusifitas daerah sebagai upaya mendatangkan iklim investasi yang besar di Kalimantan Timur 4. Keputusan penempatan lokasi Ibu kota negara yang baru dari pemerintah pusat merupakan salah satu pendorong kegiatan ekonomi di Kalimantan Timur 5. Keberadaan jalur laut dan pelabuhan ekspor di Kalimantan Timur mendorong pengembangan aktifitas produksi sumber daya alam 6. Peran masyarakat pedesaan di Kalimantan Timur yang kental nuansa budaya dan adat istiadat membantu dalam proses pembangunan secara berkelanjutan 7. Potensi keadaan alam di Kalimantan Timur yang sangat bervariasi mulai dari keanekaragaman hayati, hutan, sungai, danau, bukit, pegunungan hingga pesisir laut yang bisa menjadi obyek pariwisata andalan daerah 8. Adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan destinasi pariwisata di Kalimantan Timur | Faktor penghambat Sasaran 8:   1. Program dan kegiatan untuk pengembangan lembaga ekonomi pedesaan masih belum jelas peruntukan maupun penentuan lembaga ekonomi yang dibangun; 2. Belum ada spesifikasi dan regulasi lembaga ekonomi yang dikembangkan sehingga kemungkinan salah sasaran menjadi lebih besar; 3. Aktivitas produksi yang relatif kurang beragam dan cenderung monoton pada sektor pertanian; 4. Minimnya sasaran dan prasarana system informasi sebagai pendukung lembaga ekonomi pedesaan 5. Program pembangunan desa dan kawasan masih terhambat terhadap aksesibilitas 6. Geografi pedesaan dan kawasan di Kalimantan Timur yang masih sangat luas 7. Masih rendahnya SDM aparatur desa yang memahami administrasi pemerintahan sehingga menyulitkan program pembinaan penyelengaraan pemerintahan desa 8. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terhambat di pelosok desa Kalimantan Timur 9. Progarm kampong iklim tidak dilaksanakn pada tahun anggaran 2019 |
|  | 1. Meningkatnya Kontribusi Sektor Parwisata Terhadap Perekonomian Daerah | Faktor Pendorong secara Internal meliputi :   1. Disusunnya RPJMD Berdasarkan Program Prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim” Berani untuk Kaltim Berdaulat” sebagai acuan dana rah pembangunan daerah; 2. Adanya kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memfasilitasi dan mendorong pelaku usaha kecil dan menengah serta koperasi ikut dalam pembangunan ekonomi daerah; 3. Alokasi anggaran/pembiayaan yang bersumber dari APBD untuk memprioritaskan program pembangunan strategis sesuai RPJMD yang memiliki daya ungkit; 4. Kesesuaian jadwal dan ketentuan penyusunan perencanaan semua program dapat berjalan sesuai waktunya; 5. Ketersediaan SDM di lingkup SKPD dan institusi pemerintah serta institusi mitra yang memenuhi kualifikasi kompetensi untuk mendukung pencapaian misi 2; 6. Manajemen pembangunan provinsi Kaltim dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi berdasarkan sistem informasi yang terintegrasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Tim Anggaran Pendapatan Daerah; 7. Sudah terbangun mekanisme komunikasi - Koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengimplementasikan program pembangunan yang telah direncanakan setiap periodik; 8. Pemerintah Provinsi menyusun rencana pengembangan kawasan industri sebagai bagian pembangunan perindustrian di Kaltim   Faktor pendorong secara Eksternal, meliputi:   1. Kesesuaian Arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan global yang bertujuan meningkatkan PDRB berdasarkan pemanfaatan potensi sumber daya alam berkelanjutan dan terbarukan 2. Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan produksi dan potensi sumber daya alam yang melimpah sehingga memungkinkan pengembangan ekonomi ke arah *economic green* 3. Kondusifitas daerah sebagai upaya mendatangkan iklim investasi yang besar di Kalimantan Timur 4. Keputusan penempatan lokasi Ibu kota negara yang baru dari pemerintah pusat merupakan salah satu pendorong kegiatan ekonomi di Kalimantan Timur 5. Keberadaan jalur laut dan pelabuhan ekspor di Kalimantan Timur mendorong pengembangan aktifitas produksi sumber daya alam 6. Peran masyarakat pedesaan di Kalimantan Timur yang kental nuansa budaya dan adat istiadat membantu dalam proses pembangunan secara berkelanjutan 7. Potensi keadaan alam di Kalimantan Timur yang sangat bervariasi mulai dari keanekaragaman hayati, hutan, sungai, danau, bukit, pegunungan hingga pesisir laut yang bisa menjadi obyek pariwisata andalan daerah 8. Adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan destinasi pariwisata di Kalimantan Timur | Faktor penghambat pencapaian sasaran 9:   1. SDM, sarana dan prasarana di bidang Pariwisata Kalimantan Timur yang masih belum terampil dan lengkap untuk mendukung pembentukan kawasan pariwisata andalan. 2. Beberapa kegiatan aktraksi wisata di Kalimantan Timur masih belum terorganisasi secara professional untuk menarik daya wisatawan 3. Infrastruktur di beberapa destinasi pariwisata masih belum memadai menjadi obyek wisata. 4. Aksesibilitas destinasi pariwisata di Kalimantan Timur masih kurang 5. Belum ada lembaga pengelola pariwisata di Kalimantan Timur yang profesional 6. Masih belum adanya jaminan keamanan di destinasi pariwisata 7. Belum adanya regulasi dan kebijakan pengaturan dan pengelolaan destinasi pariwisata di Kalimantan Timur (Rencana Induk Pariwisata Daerah) 8. Belum adanya standar tarif keuangan terhadap destinasi pariwisata di Kalimantan Timur |
|  | 1. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Yang Berkelanjutan | 1. Meningkatnya Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap Perekonomian Daerah | Faktor Pendorong secara Internal meliputi :   1. Disusunnya RPJMD Berdasarkan Program Prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim” Berani untuk Kaltim Berdaulat” sebagai acuan dana rah pembangunan daerah; 2. Adanya kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memfasilitasi dan mendorong pelaku usaha kecil dan menengah serta koperasi ikut dalam pembangunan ekonomi daerah; 3. Alokasi anggaran/pembiayaan yang bersumber dari APBD untuk memprioritaskan program pembangunan strategis sesuai RPJMD yang memiliki daya ungkit; 4. Kesesuaian jadwal dan ketentuan penyusunan perencanaan semua program dapat berjalan sesuai waktunya; 5. Ketersediaan SDM di lingkup SKPD dan institusi pemerintah serta institusi mitra yang memenuhi kualifikasi kompetensi untuk mendukung pencapaian misi 2; 6. Manajemen pembangunan provinsi Kaltim dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi berdasarkan sistem informasi yang terintegrasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Tim Anggaran Pendapatan Daerah; 7. Sudah terbangun mekanisme komunikasi - Koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengimplementasikan program pembangunan yang telah direncanakan setiap periodik; 8. Pemerintah Provinsi menyusun rencana pengembangan kawasan industri sebagai bagian pembangunan perindustrian di Kaltim   Faktor pendorong secara Eksternal, meliputi:   1. Kesesuaian Arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan global yang bertujuan meningkatkan PDRB berdasarkan pemanfaatan potensi sumber daya alam berkelanjutan dan terbarukan 2. Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan produksi dan potensi sumber daya alam yang melimpah sehingga memungkinkan pengembangan ekonomi ke arah *economic green* 3. Kondusifitas daerah sebagai upaya mendatangkan iklim investasi yang besar di Kalimantan Timur 4. Keputusan penempatan lokasi Ibu kota negara yang baru dari pemerintah pusat merupakan salah satu pendorong kegiatan ekonomi di Kalimantan Timur 5. Keberadaan jalur laut dan pelabuhan ekspor di Kalimantan Timur mendorong pengembangan aktifitas produksi sumber daya alam 6. Peran masyarakat pedesaan di Kalimantan Timur yang kental nuansa budaya dan adat istiadat membantu dalam proses pembangunan secara berkelanjutan 7. Potensi keadaan alam di Kalimantan Timur yang sangat bervariasi mulai dari keanekaragaman hayati, hutan, sungai, danau, bukit, pegunungan hingga pesisir laut yang bisa menjadi obyek pariwisata andalan daerah 8. Adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan destinasi pariwisata di Kalimantan Timur | Faktor penghambat pencapaian sasaran 10 :   1. Belum adanya sistem kendali produksi dan perdagangan sektor industri di Kalimantan Timur 2. Belum adanya pengembangan industri pengolahan berdasarkan ketersediaan produksi bahan baku sehingga industri di Kalimantan Timur bersifat industri bahan baku 3. Belum ada *mapping* dan *data base* produksi bahan baku yang menjadi suplai bagi industri 4. Belum adanya database SDM terampil dan terlatih yang siap diterima Dunia Usaha Dunia Industri di Kaltim 5. Aksesibilitas kawasan produksi yang belum terkoneksi secara merata dengan kawasan industri di Kaltim 6. Belum adanya ketersediaan regulasi dan kebijakan yang mendorong dan kemudahan berinvestasi di kalimantan Timur 7. Masih rendahnya dukungan pengembangan industri kreatif di Kalimantan Timur |
|  |  | 1. Meningkatnya Realisasi Investasi | Faktor Pendorong secara Internal meliputi :   1. Disusunnya RPJMD Berdasarkan Program Prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim” Berani untuk Kaltim Berdaulat” sebagai acuan dana rah pembangunan daerah; 2. Adanya kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memfasilitasi dan mendorong pelaku usaha kecil dan menengah serta koperasi ikut dalam pembangunan ekonomi daerah; 3. Alokasi anggaran/pembiayaan yang bersumber dari APBD untuk memprioritaskan program pembangunan strategis sesuai RPJMD yang memiliki daya ungkit; 4. Kesesuaian jadwal dan ketentuan penyusunan perencanaan semua program dapat berjalan sesuai waktunya; 5. Ketersediaan SDM di lingkup SKPD dan institusi pemerintah serta institusi mitra yang memenuhi kualifikasi kompetensi untuk mendukung pencapaian misi 2; 6. Manajemen pembangunan provinsi Kaltim dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi berdasarkan sistem informasi yang terintegrasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Tim Anggaran Pendapatan Daerah; 7. Sudah terbangun mekanisme komunikasi - Koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengimplementasikan program pembangunan yang telah direncanakan setiap periodik; 8. Pemerintah Provinsi menyusun rencana pengembangan kawasan industri sebagai bagian pembangunan perindustrian di Kaltim   Faktor pendorong secara Eksternal, meliputi:   1. Kesesuaian Arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan global yang bertujuan meningkatkan PDRB berdasarkan pemanfaatan potensi sumber daya alam berkelanjutan dan terbarukan 2. Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan produksi dan potensi sumber daya alam yang melimpah sehingga memungkinkan pengembangan ekonomi ke arah *economic green* 3. Kondusifitas daerah sebagai upaya mendatangkan iklim investasi yang besar di Kalimantan Timur 4. Keputusan penempatan lokasi Ibu kota negara yang baru dari pemerintah pusat merupakan salah satu pendorong kegiatan ekonomi di Kalimantan Timur 5. Keberadaan jalur laut dan pelabuhan ekspor di Kalimantan Timur mendorong pengembangan aktifitas produksi sumber daya alam 6. Peran masyarakat pedesaan di Kalimantan Timur yang kental nuansa budaya dan adat istiadat membantu dalam proses pembangunan secara berkelanjutan 7. Potensi keadaan alam di Kalimantan Timur yang sangat bervariasi mulai dari keanekaragaman hayati, hutan, sungai, danau, bukit, pegunungan hingga pesisir laut yang bisa menjadi obyek pariwisata andalan daerah 8. Adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan destinasi pariwisata di Kalimantan Timur | Faktor penghambat pencapaian sasaran 11:   1. Disharmoni terhadap kebijakan dan regulasi investasi antara Pemerintah daerah dengan Pemerintah Pusat 2. Infrastruktur pelabuhan ekspor masih belum lengkap 3. Masih cukup lamanya proses perizinan investasi sehingga mempengaruhi biaya perizinan investasi di daerah 4. Belum cukupnya ketersediaan energi untuk kebutuhan industri 5. Aksesibilitas antara sentra produksi dengan kawasan industry belum terkonektivitas sehingga investor harus mempersiapkan biaya pembangunan jalan produksi dan pengangkutan. |
|  |  | 1. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura Terhadap Perekonomian Daerah | Faktor Pendorong secara Internal meliputi :   1. Disusunnya RPJMD Berdasarkan Program Prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim” Berani untuk Kaltim Berdaulat” sebagai acuan dana rah pembangunan daerah; 2. Adanya kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memfasilitasi dan mendorong pelaku usaha kecil dan menengah serta koperasi ikut dalam pembangunan ekonomi daerah; 3. Alokasi anggaran/pembiayaan yang bersumber dari APBD untuk memprioritaskan program pembangunan strategis sesuai RPJMD yang memiliki daya ungkit; 4. Kesesuaian jadwal dan ketentuan penyusunan perencanaan semua program dapat berjalan sesuai waktunya; 5. Ketersediaan SDM di lingkup SKPD dan institusi pemerintah serta institusi mitra yang memenuhi kualifikasi kompetensi untuk mendukung pencapaian misi 2; 6. Manajemen pembangunan provinsi Kaltim dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi berdasarkan sistem informasi yang terintegrasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Tim Anggaran Pendapatan Daerah; 7. Sudah terbangun mekanisme komunikasi - Koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengimplementasikan program pembangunan yang telah direncanakan setiap periodik; 8. Pemerintah Provinsi menyusun rencana pengembangan kawasan industri sebagai bagian pembangunan perindustrian di Kaltim   Faktor pendorong secara Eksternal, meliputi:   1. Kesesuaian Arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan global yang bertujuan meningkatkan PDRB berdasarkan pemanfaatan potensi sumber daya alam berkelanjutan dan terbarukan 2. Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan produksi dan potensi sumber daya alam yang melimpah sehingga memungkinkan pengembangan ekonomi ke arah *economic green* 3. Kondusifitas daerah sebagai upaya mendatangkan iklim investasi yang besar di Kalimantan Timur 4. Keputusan penempatan lokasi Ibu kota negara yang baru dari pemerintah pusat merupakan salah satu pendorong kegiatan ekonomi di Kalimantan Timur 5. Keberadaan jalur laut dan pelabuhan ekspor di Kalimantan Timur mendorong pengembangan aktifitas produksi sumber daya alam 6. Peran masyarakat pedesaan di Kalimantan Timur yang kental nuansa budaya dan adat istiadat membantu dalam proses pembangunan secara berkelanjutan 7. Potensi keadaan alam di Kalimantan Timur yang sangat bervariasi mulai dari keanekaragaman hayati, hutan, sungai, danau, bukit, pegunungan hingga pesisir laut yang bisa menjadi obyek pariwisata andalan daerah 8. Adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan destinasi pariwisata di Kalimantan Timur | Faktor penghambat pencapaian sasaran 12 :   1. Belum terkonektivitasnya sentra produksi pertanian dengan kawasan industri pengolahan 2. Rendahnya kesesuaian lahan yang terdapat di RTRW 3. Ketersediaan infrastruktur irigasi yang belum terwakili di seluruh kawasan pertanian 4. Belum adanya regulasi pengawasan dan pengendalian tata niaga pertanian di Kalimantan Timur 5. Disharmoni kebijakan dan regulasi antar perangkat daerah yang mengatur pengembangan aktivitas produksi di kawasan pertanian 6. Kurangnya pemanfaatan teknologi tepat guna dalam mendukung produktivitas pertanian. 7. Belum adanya Optimalisasi lahan yang sudah ditetapkan di RTRWP Kaltim 8. Lemahnya peran UPTD dalam mendorong peningkatan ketersediaan benih dan produktivitas padi dan tanaman hortikultura. 9. Belum adanya optimalisasi terhadap peran pertanian sistem berladang (padi ladang) padahal sistem ini merupakan unsur kearifan lokal di Kalimantan Timur. |
|  |  | 1. Meningkatnya Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap Perekonomian Daerah | Faktor Pendorong secara Internal meliputi :   1. Disusunnya RPJMD Berdasarkan Program Prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim” Berani untuk Kaltim Berdaulat” sebagai acuan dana rah pembangunan daerah; 2. Adanya kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memfasilitasi dan mendorong pelaku usaha kecil dan menengah serta koperasi ikut dalam pembangunan ekonomi daerah; 3. Alokasi anggaran/pembiayaan yang bersumber dari APBD untuk memprioritaskan program pembangunan strategis sesuai RPJMD yang memiliki daya ungkit; 4. Kesesuaian jadwal dan ketentuan penyusunan perencanaan semua program dapat berjalan sesuai waktunya; 5. Ketersediaan SDM di lingkup SKPD dan institusi pemerintah serta institusi mitra yang memenuhi kualifikasi kompetensi untuk mendukung pencapaian misi 2; 6. Manajemen pembangunan provinsi Kaltim dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi berdasarkan sistem informasi yang terintegrasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Tim Anggaran Pendapatan Daerah; 7. Sudah terbangun mekanisme komunikasi - Koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengimplementasikan program pembangunan yang telah direncanakan setiap periodik; 8. Pemerintah Provinsi menyusun rencana pengembangan kawasan industri sebagai bagian pembangunan perindustrian di Kaltim   Faktor pendorong secara Eksternal, meliputi:   1. Kesesuaian Arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan global yang bertujuan meningkatkan PDRB berdasarkan pemanfaatan potensi sumber daya alam berkelanjutan dan terbarukan 2. Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan produksi dan potensi sumber daya alam yang melimpah sehingga memungkinkan pengembangan ekonomi ke arah *economic green* 3. Kondusifitas daerah sebagai upaya mendatangkan iklim investasi yang besar di Kalimantan Timur 4. Keputusan penempatan lokasi Ibu kota negara yang baru dari pemerintah pusat merupakan salah satu pendorong kegiatan ekonomi di Kalimantan Timur 5. Keberadaan jalur laut dan pelabuhan ekspor di Kalimantan Timur mendorong pengembangan aktifitas produksi sumber daya alam 6. Peran masyarakat pedesaan di Kalimantan Timur yang kental nuansa budaya dan adat istiadat membantu dalam proses pembangunan secara berkelanjutan 7. Potensi keadaan alam di Kalimantan Timur yang sangat bervariasi mulai dari keanekaragaman hayati, hutan, sungai, danau, bukit, pegunungan hingga pesisir laut yang bisa menjadi obyek pariwisata andalan daerah 8. Adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan destinasi pariwisata di Kalimantan Timur | Faktor penghambat pencapaian sasaran 13 :   1. Belum adanya penetapan kawasan peternakan di RTRW Kalimantan Timur 2. Penggunaan pola peningkatan produktivitas dengan memanfaatkan sistem pengadaan dan mendatangkan ternak dari daerah lain. 3. Belum adanya regulasi pengawasan dan pengendalian tata niaga peternakan dan produk asal hewan di Kalimantan Timur 4. Rendahnya kesediaan bibit dan bakalan ternak di Kalimantan Timur 5. Belum ada program penguatan keterampilan kelembagaan peternak di Kaltim 6. Kemampuan permodalan peternak di Kaltim yang masib terbatas 7. Belum adanya industri peternakan besar yang bergerak sisi hulu sampai hilir produk ternak di Kaltim 8. Belum adanya industri pakan ternak di Kaltim 9. Tingkat pengetahuan manajemen pemeliharaan ternak oleh peternak yang masih rendah 10. Masih belum lengkapnya sarana dan prasarana pelayanan keswan di Kaltim 11. Rendahnya penguasaan peternak terhadap teknologi pemanfaatan Lahan peternakan sebagai kawasan pengembangan ternak 12. Masih kurangnya sosialisasi dan pelatihan penguasaan teknologi terhadap peternak 13. Kurang jumlah aparatur peternakan seperti inseminator, paramedik veteriner dan petugas medik layanan keswan di Kaltim 14. Belum adanya regulasi tentang pengembangan kawasan peternakan 15. Rendahnya populasi dan produktivitas ternak di kaltim menjadikan keterbatasan pemenuhan kebutuhan daging ternak (ruminansia) |
|  |  | 1. Meningkatnya Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap Perekonomian Daerah | Faktor Pendorong secara Internal meliputi :   1. Disusunnya RPJMD Berdasarkan Program Prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim” Berani untuk Kaltim Berdaulat” sebagai acuan dana rah pembangunan daerah; 2. Adanya kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memfasilitasi dan mendorong pelaku usaha kecil dan menengah serta koperasi ikut dalam pembangunan ekonomi daerah; 3. Alokasi anggaran/pembiayaan yang bersumber dari APBD untuk memprioritaskan program pembangunan strategis sesuai RPJMD yang memiliki daya ungkit; 4. Kesesuaian jadwal dan ketentuan penyusunan perencanaan semua program dapat berjalan sesuai waktunya; 5. Ketersediaan SDM di lingkup SKPD dan institusi pemerintah serta institusi mitra yang memenuhi kualifikasi kompetensi untuk mendukung pencapaian misi 2; 6. Manajemen pembangunan provinsi Kaltim dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi berdasarkan sistem informasi yang terintegrasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Tim Anggaran Pendapatan Daerah; 7. Sudah terbangun mekanisme komunikasi - Koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengimplementasikan program pembangunan yang telah direncanakan setiap periodik; 8. Pemerintah Provinsi menyusun rencana pengembangan kawasan industri sebagai bagian pembangunan perindustrian di Kaltim   Faktor pendorong secara Eksternal, meliputi:   1. Kesesuaian Arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan global yang bertujuan meningkatkan PDRB berdasarkan pemanfaatan potensi sumber daya alam berkelanjutan dan terbarukan 2. Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan produksi dan potensi sumber daya alam yang melimpah sehingga memungkinkan pengembangan ekonomi ke arah *economic green* 3. Kondusifitas daerah sebagai upaya mendatangkan iklim investasi yang besar di Kalimantan Timur 4. Keputusan penempatan lokasi Ibu kota negara yang baru dari pemerintah pusat merupakan salah satu pendorong kegiatan ekonomi di Kalimantan Timur 5. Keberadaan jalur laut dan pelabuhan ekspor di Kalimantan Timur mendorong pengembangan aktifitas produksi sumber daya alam 6. Peran masyarakat pedesaan di Kalimantan Timur yang kental nuansa budaya dan adat istiadat membantu dalam proses pembangunan secara berkelanjutan 7. Potensi keadaan alam di Kalimantan Timur yang sangat bervariasi mulai dari keanekaragaman hayati, hutan, sungai, danau, bukit, pegunungan hingga pesisir laut yang bisa menjadi obyek pariwisata andalan daerah 8. Adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan destinasi pariwisata di Kalimantan Timur | Faktor penghambat pencapaian sasaran 14 :   1. Belum terkonektivitasnya sentra produksi perkebunan dengan kawasan industri pengolahan 2. Rendahnya kesesuaian lahan perkebunan yang terdapat di RTRW 3. Masalah lahan bagi pengembangan kebun baru di perkebunan yang diakibatkan ketidaktuntasan kesesuaian RTRWP 4. Belum adanya industri hilir (hilirisasi industri) sektor perkebunan 5. Aksesibilitas kawasan perkebunan di kaltim masih rendah 6. Program pengembangan sektor perkebunan lebih memfokuskan kepada komoditi kelapa sawit padahal terdapat komoditi yang lain sebagai potensi unggulan 7. Belum ada database produksi sektor perkebunan sehingga perhitungan berdasarkan laporan perusahaan 8. Belum adanya regulasi pengawasan dan pengendalian tata niaga perkebunan dan produk perkebunan di Kalimantan Timur 9. Disharmoni kebijakan dan regulasi antar perangkat daerah yang mengatur pengembangan aktivitas produksi di sektor perkebunan di Kaltim. 10. Masih kurangnya SDM di perangkat daerah sektor perkebunan dalam melakukan kontrol dan evaluasi produksi industri perkebunan |
|  |  | 1. Meningkatnya Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap Perekonomian Daerah | Faktor Pendorong secara Internal meliputi :   1. Disusunnya RPJMD Berdasarkan Program Prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim” Berani untuk Kaltim Berdaulat” sebagai acuan dana rah pembangunan daerah; 2. Adanya kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memfasilitasi dan mendorong pelaku usaha kecil dan menengah serta koperasi ikut dalam pembangunan ekonomi daerah; 3. Alokasi anggaran/pembiayaan yang bersumber dari APBD untuk memprioritaskan program pembangunan strategis sesuai RPJMD yang memiliki daya ungkit; 4. Kesesuaian jadwal dan ketentuan penyusunan perencanaan semua program dapat berjalan sesuai waktunya; 5. Ketersediaan SDM di lingkup SKPD dan institusi pemerintah serta institusi mitra yang memenuhi kualifikasi kompetensi untuk mendukung pencapaian misi 2; 6. Manajemen pembangunan provinsi Kaltim dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi berdasarkan sistem informasi yang terintegrasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Tim Anggaran Pendapatan Daerah; 7. Sudah terbangun mekanisme komunikasi - Koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengimplementasikan program pembangunan yang telah direncanakan setiap periodik; 8. Pemerintah Provinsi menyusun rencana pengembangan kawasan industri sebagai bagian pembangunan perindustrian di Kaltim   Faktor pendorong secara Eksternal, meliputi:   1. Kesesuaian Arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan global yang bertujuan meningkatkan PDRB berdasarkan pemanfaatan potensi sumber daya alam berkelanjutan dan terbarukan 2. Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan produksi dan potensi sumber daya alam yang melimpah sehingga memungkinkan pengembangan ekonomi ke arah *economic green* 3. Kondusifitas daerah sebagai upaya mendatangkan iklim investasi yang besar di Kalimantan Timur 4. Keputusan penempatan lokasi Ibu kota negara yang baru dari pemerintah pusat merupakan salah satu pendorong kegiatan ekonomi di Kalimantan Timur 5. Keberadaan jalur laut dan pelabuhan ekspor di Kalimantan Timur mendorong pengembangan aktifitas produksi sumber daya alam 6. Peran masyarakat pedesaan di Kalimantan Timur yang kental nuansa budaya dan adat istiadat membantu dalam proses pembangunan secara berkelanjutan 7. Potensi keadaan alam di Kalimantan Timur yang sangat bervariasi mulai dari keanekaragaman hayati, hutan, sungai, danau, bukit, pegunungan hingga pesisir laut yang bisa menjadi obyek pariwisata andalan daerah 8. Adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan destinasi pariwisata di Kalimantan Timur. | Faktor penghambat pencapaian sasaran 15 :   1. Belum ditetapkannnya Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sebagai bagaian penataan ruang wilayah pesisir dan kelauatan Kaltim 2. Belum optimalnya pengawasan UU fishing di wilayah kelautan yang menjadi hak pengelolaan suatu provinsi ( 0 – 12 mil) 3. Belum optimalnya peningkatan kapasitas perangkat daerah SDM kelautan dan perikanan terutama dalam hal perencanaan, pengawasan dan pengendalian kawasan perikanan dan kelautan 4. Belum optimalnya industri pengolahan perikanan di Kaltim sehingga hasil tangkapan perikanan dan kelautan langsung masuk di sistem perdagangan 5. Masih rendahnya pemanfaatan iptek kelautan dan perikanan serta diseminasi teknologi oleh nelayan-nelayan di Kaltim 6. Belum optimalnya pengawasan system kendali dan tata kelola Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di Kaltim 7. Disharmoni kebijakan dan regulasi antar perangkat daerah yang mengatur pengembangan aktivitas produksi di sektor perikanan dan kelautan di Kaltim. 8. Masih rendahnya program pemberdayaan nelayan-nelayan di Kaltim 9. Belum optimalnya peran UPTD Pembenihan dalam mendukung penyediaan benih dan produktivitas kawasan perikanan |
|  |  | 1. Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Perekonomian Daerah | Faktor Pendorong secara Internal meliputi :   1. Disusunnya RPJMD Berdasarkan Program Prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim” Berani untuk Kaltim Berdaulat” sebagai acuan dana rah pembangunan daerah; 2. Adanya kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memfasilitasi dan mendorong pelaku usaha kecil dan menengah serta koperasi ikut dalam pembangunan ekonomi daerah; 3. Alokasi anggaran/pembiayaan yang bersumber dari APBD untuk memprioritaskan program pembangunan strategis sesuai RPJMD yang memiliki daya ungkit; 4. Kesesuaian jadwal dan ketentuan penyusunan perencanaan semua program dapat berjalan sesuai waktunya; 5. Ketersediaan SDM di lingkup SKPD dan institusi pemerintah serta institusi mitra yang memenuhi kualifikasi kompetensi untuk mendukung pencapaian misi 2; 6. Manajemen pembangunan provinsi Kaltim dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi berdasarkan sistem informasi yang terintegrasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Tim Anggaran Pendapatan Daerah; 7. Sudah terbangun mekanisme komunikasi - Koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengimplementasikan program pembangunan yang telah direncanakan setiap periodik; 8. Pemerintah Provinsi menyusun rencana pengembangan kawasan industri sebagai bagian pembangunan perindustrian di Kaltim   Faktor pendorong secara Eksternal, meliputi:   1. Kesesuaian Arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan global yang bertujuan meningkatkan PDRB berdasarkan pemanfaatan potensi sumber daya alam berkelanjutan dan terbarukan 2. Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan produksi dan potensi sumber daya alam yang melimpah sehingga memungkinkan pengembangan ekonomi ke arah *economic green* 3. Kondusifitas daerah sebagai upaya mendatangkan iklim investasi yang besar di Kalimantan Timur 4. Keputusan penempatan lokasi Ibu kota negara yang baru dari pemerintah pusat merupakan salah satu pendorong kegiatan ekonomi di Kalimantan Timur 5. Keberadaan jalur laut dan pelabuhan ekspor di Kalimantan Timur mendorong pengembangan aktifitas produksi sumber daya alam 6. Peran masyarakat pedesaan di Kalimantan Timur yang kental nuansa budaya dan adat istiadat membantu dalam proses pembangunan secara berkelanjutan 7. Potensi keadaan alam di Kalimantan Timur yang sangat bervariasi mulai dari keanekaragaman hayati, hutan, sungai, danau, bukit, pegunungan hingga pesisir laut yang bisa menjadi obyek pariwisata andalan daerah 8. Adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan destinasi pariwisata di Kalimantan Timur | Faktor penghambat pencapaian sasaran 16 :   1. Disharmoni kebijakan dan regulasi antar perangkat daerah yang mengatur pengembangan aktivitas produksi di sektor kehutanan di Kaltim. 2. Belum optimalnya peran UPTD Pembenihan dalam mendukung penyediaan benih dan produktivitas kawasan perikanan 3. Belum adanya regulasi dan kebijakan terhadap pengawasan dan pengendalian produksi dan perdagangan sumberdaya alam secara langsung dari perangkat daerah. 4. Aksesibilitas produksi dari kawasan produksi ke pusat pelayanan ekonomi belum terkoneksi dengan baik sehingga terjadi sistem perdagangan sumberdaya alam tidak keluar pada pusat pelayanan ekonomi yang telah ditetapkan. 5. Jumlah dan pengelolaan terminal produksi belum tertata dan terdokumentasi secara baik 6. Belum adanya sistem kendali bahan baku industri kehutanan untuk mendorong program hilirisasi industry kehutanan 7. Besarnya peran swasta dan masyarakat dalam menggerakan pertumbuhan ekonomi tanpa bisa diimbangi peran perangkat daerah dalam mendukung kegiatan tersebut 8. Belum adanya data base produksi sumber daya alam di kawasan produksi yang dibuat perangkat daerah sebagai penanggung jawab kawasan 9. Perencanaan program kerja perangkat daerah belum berbasis geospasial, geoekonomi dan geososiokultur sehingga potensi dan pengelolaan kawasan belum optimal 10. Kekurangan SDM dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sistem tata kelola produksi kawasan |
|  |  | 1. Meningkatnya Pendanaan Pembangunan Daerah | Faktor Pendorong secara Internal meliputi :   1. Disusunnya RPJMD Berdasarkan Program Prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim” Berani untuk Kaltim Berdaulat” sebagai acuan dana rah pembangunan daerah; 2. Adanya kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memfasilitasi dan mendorong pelaku usaha kecil dan menengah serta koperasi ikut dalam pembangunan ekonomi daerah; 3. Alokasi anggaran/pembiayaan yang bersumber dari APBD untuk memprioritaskan program pembangunan strategis sesuai RPJMD yang memiliki daya ungkit; 4. Kesesuaian jadwal dan ketentuan penyusunan perencanaan semua program dapat berjalan sesuai waktunya; 5. Ketersediaan SDM di lingkup SKPD dan institusi pemerintah serta institusi mitra yang memenuhi kualifikasi kompetensi untuk mendukung pencapaian misi 2; 6. Manajemen pembangunan provinsi Kaltim dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi berdasarkan sistem informasi yang terintegrasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Tim Anggaran Pendapatan Daerah; 7. Sudah terbangun mekanisme komunikasi - Koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengimplementasikan program pembangunan yang telah direncanakan setiap periodik; 8. Pemerintah Provinsi menyusun rencana pengembangan kawasan industri sebagai bagian pembangunan perindustrian di Kaltim   Faktor pendorong secara Eksternal, meliputi:   1. Kesesuaian Arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan global yang bertujuan meningkatkan PDRB berdasarkan pemanfaatan potensi sumber daya alam berkelanjutan dan terbarukan 2. Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan produksi dan potensi sumber daya alam yang melimpah sehingga memungkinkan pengembangan ekonomi ke arah *economic green* 3. Kondusifitas daerah sebagai upaya mendatangkan iklim investasi yang besar di Kalimantan Timur 4. Keputusan penempatan lokasi Ibu kota negara yang baru dari pemerintah pusat merupakan salah satu pendorong kegiatan ekonomi di Kalimantan Timur 5. Keberadaan jalur laut dan pelabuhan ekspor di Kalimantan Timur mendorong pengembangan aktifitas produksi sumber daya alam 6. Peran masyarakat pedesaan di Kalimantan Timur yang kental nuansa budaya dan adat istiadat membantu dalam proses pembangunan secara berkelanjutan 7. Potensi keadaan alam di Kalimantan Timur yang sangat bervariasi mulai dari keanekaragaman hayati, hutan, sungai, danau, bukit, pegunungan hingga pesisir laut yang bisa menjadi obyek pariwisata andalan daerah 8. Adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan destinasi pariwisata di Kalimantan Timur | Faktor penghambat pencapaian sasaran 17 :   1. Belum adanya regulasi dari perangkat daerah yang berbasis pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas ekonomi di kawasan produksi sehingga masih belum terdata potensi penerimaan daerah yang ada di Kaltim 2. Belum adanya data base produksi sumber daya alam di kawasan produksi yang menjadi potensi penerimaan daerah 3. Perencanaan program kerja perangkat daerah bidang pendapatan belum berbasis geospasial dan geoekonomi belum optimal dalam mengeksplorasi potensi pendapatan daerah 4. Kekurangan SDM dalam melakukan pengawasan dan pengendalian potensi penerimaan daerah 5. Jumlah UPTD Pendapatan sebagai pelaksana teknis masih sedikit. 6. Program kegiatan yang direncanakan hanya bersifat rutinitas sehingga inovasi untuk menemukan sumber pendapatan baru masih belum maksimal 7. Program menemukan sumber pebdapatan baru tidak dilaksanakan pada tahun anggaran 2019. 8. Faktor kekurangan SDM di UPTD menyebabkan upaya untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemungutan retribusi dan pajak belum maksimal. 9. Belum adanya revisi regulasi dan kebijakan tentang keterbaruan struktur pendapatan daerah Kalimantan Timur. |

* + 1. **Analisis Faktor Pendorong Capaian Kinerja Pembangunan Misi 3.**

Terkait misi 3, pada prinsipnya terdapat 1 tujuan dan 5 sasaran yang hendak dicapai melalui 8 program yang dilaksanakan oleh tiga perangkat daerah. Satu tujuan tersebut yakni Meningkatkan pemerataan pelayanan infrastruktur dasar. Adapun 5 sasaran sebagaimana dimaksud yakni *pertama*, Meningkatnya aksesibilitas wilayah; *kedua*, Meningkatnya konektivitas antar kawasan; *ketiga*, Meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air; *keempat*, Menurunnya kawasan kumuh; dan *kelima*, Terpenuhinya kebutuhan energi daerah. Tiga perangkat daerah terkait yang terlibat dalam mewujudkan misi, tujuan dan sasaran tersebut yakni Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pemukiman Rakyat, serta Dinas Energi Sumber Daya Mineral. Berkenaan dengan faktor pendorong capaian kinerja pembangunan misi 3 dapat terlihat pada Tabel di bawah ini

| **Misi** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Faktor** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pendorong** | **Penghambat** |
| Misi 3: Berdaulat dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan | 1. Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar | 1. Meningkatkan Aksesibilitas Wilayah | Faktor Pendorong secara Internal meliputi :   1. Disusunnya RPJMD Berdasarkan Program Prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim” Berani untuk Kaltim Berdaulat” sebagai acuan dana rah pembangunan daerah; 2. Adanya kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memfasilitasi dan mendorong pelaku usaha kecil dan menengah serta koperasi ikut dalam pembangunan ekonomi daerah; 3. Alokasi anggaran/pembiayaan yang bersumber dari APBD untuk memprioritaskan program pembangunan strategis sesuai RPJMD yang memiliki daya ungkit; 4. Kesesuaian jadwal dan ketentuan penyusunan perencanaan semua program dapat berjalan sesuai waktunya; 5. Ketersediaan SDM di lingkup SKPD dan institusi pemerintah serta institusi mitra yang memenuhi kualifikasi kompetensi untuk mendukung pencapaian misi 2; 6. Manajemen pembangunan provinsi Kaltim dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi berdasarkan sistem informasi yang terintegrasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Tim Anggaran Pendapatan Daerah; 7. Sudah terbangun mekanisme komunikasi - Koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengimplementasikan program pembangunan yang telah direncanakan setiap periodik; 8. Pemerintah Provinsi menyusun rencana pengembangan kawasan industri sebagai bagian pembangunan perindustrian di Kaltim   Faktor pendorong secara Eksternal, meliputi:   1. Kesesuaian Arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan global yang bertujuan meningkatkan PDRB berdasarkan pemanfaatan potensi sumber daya alam berkelanjutan dan terbarukan 2. Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan produksi dan potensi sumber daya alam yang melimpah sehingga memungkinkan pengembangan ekonomi ke arah *economic green* 3. Kondusifitas daerah sebagai upaya mendatangkan iklim investasi yang besar di Kalimantan Timur 4. Keputusan penempatan lokasi Ibu kota negara yang baru dari pemerintah pusat merupakan salah satu pendorong kegiatan ekonomi di Kalimantan Timur 5. Keberadaan jalur laut dan pelabuhan ekspor di Kalimantan Timur mendorong pengembangan aktifitas produksi sumber daya alam 6. Peran masyarakat pedesaan di Kalimantan Timur yang kental nuansa budaya dan adat istiadat membantu dalam proses pembangunan secara berkelanjutan 7. Potensi keadaan alam di Kalimantan Timur yang sangat bervariasi mulai dari keanekaragaman hayati, hutan, sungai, danau, bukit, pegunungan hingga pesisir laut yang bisa menjadi obyek pariwisata andalan daerah 8. Adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan destinasi pariwisata di Kalimantan Timur | Faktor Penghambat Pencapaian Sasaran 18:   1. Program tidak dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 |
|  | 1. Meningkatkan Konektivitas Antar Kawasan | Faktor Pendorong secara Internal meliputi :   1. Disusunnya RPJMD Berdasarkan Program Prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim” Berani untuk Kaltim Berdaulat” sebagai acuan dana rah pembangunan daerah; 2. Adanya kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memfasilitasi dan mendorong pelaku usaha kecil dan menengah serta koperasi ikut dalam pembangunan ekonomi daerah; 3. Alokasi anggaran/pembiayaan yang bersumber dari APBD untuk memprioritaskan program pembangunan strategis sesuai RPJMD yang memiliki daya ungkit; 4. Kesesuaian jadwal dan ketentuan penyusunan perencanaan semua program dapat berjalan sesuai waktunya; 5. Ketersediaan SDM di lingkup SKPD dan institusi pemerintah serta institusi mitra yang memenuhi kualifikasi kompetensi untuk mendukung pencapaian misi 2; 6. Manajemen pembangunan provinsi Kaltim dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi berdasarkan sistem informasi yang terintegrasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Tim Anggaran Pendapatan Daerah; 7. Sudah terbangun mekanisme komunikasi - Koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengimplementasikan program pembangunan yang telah direncanakan setiap periodik; 8. Pemerintah Provinsi menyusun rencana pengembangan kawasan industri sebagai bagian pembangunan perindustrian di Kaltim   Faktor pendorong secara Eksternal, meliputi:   1. Kesesuaian Arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan global yang bertujuan meningkatkan PDRB berdasarkan pemanfaatan potensi sumber daya alam berkelanjutan dan terbarukan 2. Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan produksi dan potensi sumber daya alam yang melimpah sehingga memungkinkan pengembangan ekonomi ke arah *economic green* 3. Kondusifitas daerah sebagai upaya mendatangkan iklim investasi yang besar di Kalimantan Timur 4. Keputusan penempatan lokasi Ibu kota negara yang baru dari pemerintah pusat merupakan salah satu pendorong kegiatan ekonomi di Kalimantan Timur 5. Keberadaan jalur laut dan pelabuhan ekspor di Kalimantan Timur mendorong pengembangan aktifitas produksi sumber daya alam 6. Peran masyarakat pedesaan di Kalimantan Timur yang kental nuansa budaya dan adat istiadat membantu dalam proses pembangunan secara berkelanjutan 7. Potensi keadaan alam di Kalimantan Timur yang sangat bervariasi mulai dari keanekaragaman hayati, hutan, sungai, danau, bukit, pegunungan hingga pesisir laut yang bisa menjadi obyek pariwisata andalan daerah 8. Adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan destinasi pariwisata di Kalimantan Timur | Faktor penghambat Sasaran 19:   1. Program dan kegiatan untuk pengembangan lembaga ekonomi pedesaan masih belum jelas peruntukan maupun penentuan lembaga ekonomi yang dibangun; 2. Belum ada spesifikasi dan regulasi lembaga ekonomi yang dikembangkan sehingga kemungkinan salah sasaran menjadi lebih besar; 3. Aktivitas produksi yang relatif kurang beragam dan cenderung monoton pada sektor pertanian; 4. Minimnya sasaran dan prasarana system informasi sebagai pendukung lembaga ekonomi pedesaan 5. Program pembangunan desa dan kawasan masih terhambat terhadap aksesibilitas 6. Geografi pedesaan dan kawasan di Kalimantan Timur yang masih sangat luas 7. Masih rendahnya SDM aparatur desa yang memahami administrasi pemerintahan sehingga menyulitkan program pembinaan penyelengaraan pemerintahan desa 8. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terhambat di pelosok desa Kalimantan Timur 9. Progarm kampong iklim tidak dilaksanakn pada tahun anggaran 2019 |
|  | 1. Meningkatkan Fungsi Pelayanan Infrastruktur Sumber Daya Air | Faktor Pendorong secara Internal meliputi :   1. Disusunnya RPJMD Berdasarkan Program Prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim” Berani untuk Kaltim Berdaulat” sebagai acuan dana rah pembangunan daerah; 2. Adanya kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memfasilitasi dan mendorong pelaku usaha kecil dan menengah serta koperasi ikut dalam pembangunan ekonomi daerah; 3. Alokasi anggaran/pembiayaan yang bersumber dari APBD untuk memprioritaskan program pembangunan strategis sesuai RPJMD yang memiliki daya ungkit; 4. Kesesuaian jadwal dan ketentuan penyusunan perencanaan semua program dapat berjalan sesuai waktunya; 5. Ketersediaan SDM di lingkup SKPD dan institusi pemerintah serta institusi mitra yang memenuhi kualifikasi kompetensi untuk mendukung pencapaian misi 2; 6. Manajemen pembangunan provinsi Kaltim dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi berdasarkan sistem informasi yang terintegrasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Tim Anggaran Pendapatan Daerah; 7. Sudah terbangun mekanisme komunikasi - Koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengimplementasikan program pembangunan yang telah direncanakan setiap periodik; 8. Pemerintah Provinsi menyusun rencana pengembangan kawasan industri sebagai bagian pembangunan perindustrian di Kaltim   Faktor pendorong secara Eksternal, meliputi:   1. Kesesuaian Arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan global yang bertujuan meningkatkan PDRB berdasarkan pemanfaatan potensi sumber daya alam berkelanjutan dan terbarukan 2. Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan produksi dan potensi sumber daya alam yang melimpah sehingga memungkinkan pengembangan ekonomi ke arah *economic green* 3. Kondusifitas daerah sebagai upaya mendatangkan iklim investasi yang besar di Kalimantan Timur 4. Keputusan penempatan lokasi Ibu kota negara yang baru dari pemerintah pusat merupakan salah satu pendorong kegiatan ekonomi di Kalimantan Timur 5. Keberadaan jalur laut dan pelabuhan ekspor di Kalimantan Timur mendorong pengembangan aktifitas produksi sumber daya alam 6. Peran masyarakat pedesaan di Kalimantan Timur yang kental nuansa budaya dan adat istiadat membantu dalam proses pembangunan secara berkelanjutan 7. Potensi keadaan alam di Kalimantan Timur yang sangat bervariasi mulai dari keanekaragaman hayati, hutan, sungai, danau, bukit, pegunungan hingga pesisir laut yang bisa menjadi obyek pariwisata andalan daerah 8. Adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan destinasi pariwisata di Kalimantan Timur | Faktor penghambat pencapaian sasaran 20:   1. SDM, sarana dan prasarana di bidang Pariwisata Kalimantan Timur yang masih belum terampil dan lengkap untuk mendukung pembentukan kawasan pariwisata andalan. 2. Beberapa kegiatan aktraksi wisata di Kalimantan Timur masih belum terorganisasi secara professional untuk menarik daya wisatawan 3. Infrastruktur di beberapa destinasi pariwisata masih belum memadai menjadi obyek wisata. 4. Aksesibilitas destinasi pariwisata di Kalimantan Timur masih kurang 5. Belum ada lembaga pengelola pariwisata di Kalimantan Timur yang profesional 6. Masih belum adanya jaminan keamanan di destinasi pariwisata 7. Belum adanya regulasi dan kebijakan pengaturan dan pengelolaan destinasi pariwisata di Kalimantan Timur (Rencana Induk Pariwisata Daerah) 8. Belum adanya standar tarif keuangan terhadap destinasi pariwisata di Kalimantan Timur |
|  | 1. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Yang Berkelanjutan | 1. Menurunnya Kawasan Kumuh | Faktor Pendorong secara Internal meliputi :   1. Disusunnya RPJMD Berdasarkan Program Prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim” Berani untuk Kaltim Berdaulat” sebagai acuan dana rah pembangunan daerah; 2. Adanya kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memfasilitasi dan mendorong pelaku usaha kecil dan menengah serta koperasi ikut dalam pembangunan ekonomi daerah; 3. Alokasi anggaran/pembiayaan yang bersumber dari APBD untuk memprioritaskan program pembangunan strategis sesuai RPJMD yang memiliki daya ungkit; 4. Kesesuaian jadwal dan ketentuan penyusunan perencanaan semua program dapat berjalan sesuai waktunya; 5. Ketersediaan SDM di lingkup SKPD dan institusi pemerintah serta institusi mitra yang memenuhi kualifikasi kompetensi untuk mendukung pencapaian misi 2; 6. Manajemen pembangunan provinsi Kaltim dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi berdasarkan sistem informasi yang terintegrasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Tim Anggaran Pendapatan Daerah; 7. Sudah terbangun mekanisme komunikasi - Koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengimplementasikan program pembangunan yang telah direncanakan setiap periodik; 8. Pemerintah Provinsi menyusun rencana pengembangan kawasan industri sebagai bagian pembangunan perindustrian di Kaltim   Faktor pendorong secara Eksternal, meliputi:   1. Kesesuaian Arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan global yang bertujuan meningkatkan PDRB berdasarkan pemanfaatan potensi sumber daya alam berkelanjutan dan terbarukan 2. Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan produksi dan potensi sumber daya alam yang melimpah sehingga memungkinkan pengembangan ekonomi ke arah *economic green* 3. Kondusifitas daerah sebagai upaya mendatangkan iklim investasi yang besar di Kalimantan Timur 4. Keputusan penempatan lokasi Ibu kota negara yang baru dari pemerintah pusat merupakan salah satu pendorong kegiatan ekonomi di Kalimantan Timur 5. Keberadaan jalur laut dan pelabuhan ekspor di Kalimantan Timur mendorong pengembangan aktifitas produksi sumber daya alam 6. Peran masyarakat pedesaan di Kalimantan Timur yang kental nuansa budaya dan adat istiadat membantu dalam proses pembangunan secara berkelanjutan 7. Potensi keadaan alam di Kalimantan Timur yang sangat bervariasi mulai dari keanekaragaman hayati, hutan, sungai, danau, bukit, pegunungan hingga pesisir laut yang bisa menjadi obyek pariwisata andalan daerah 8. Adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan destinasi pariwisata di Kalimantan Timur | Faktor penghambat pencapaian sasaran 21 :   1. Belum adanya sistem kendali produksi dan perdagangan sektor industri di Kalimantan Timur 2. Belum adanya pengembangan industri pengolahan berdasarkan ketersediaan produksi bahan baku sehingga industri di Kalimantan Timur bersifat industri bahan baku 3. Belum ada *mapping* dan *data base* produksi bahan baku yang menjadi suplai bagi industri 4. Belum adanya database SDM terampil dan terlatih yang siap diterima Dunia Usaha Dunia Industri di Kaltim 5. Aksesibilitas kawasan produksi yang belum terkoneksi secara merata dengan kawasan industri di Kaltim 6. Belum adanya ketersediaan regulasi dan kebijakan yang mendorong dan kemudahan berinvestasi di kalimantan Timur 7. Masih rendahnya dukungan pengembangan industri kreatif di Kalimantan Timur |
|  |  | 1. Terpenuhinya kebutuhan energi | Faktor Pendorong secara Internal meliputi :   1. Disusunnya RPJMD Berdasarkan Program Prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim” Berani untuk Kaltim Berdaulat” sebagai acuan dana rah pembangunan daerah; 2. Adanya kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memfasilitasi dan mendorong pelaku usaha kecil dan menengah serta koperasi ikut dalam pembangunan ekonomi daerah; 3. Alokasi anggaran/pembiayaan yang bersumber dari APBD untuk memprioritaskan program pembangunan strategis sesuai RPJMD yang memiliki daya ungkit; 4. Kesesuaian jadwal dan ketentuan penyusunan perencanaan semua program dapat berjalan sesuai waktunya; 5. Ketersediaan SDM di lingkup SKPD dan institusi pemerintah serta institusi mitra yang memenuhi kualifikasi kompetensi untuk mendukung pencapaian misi 2; 6. Manajemen pembangunan provinsi Kaltim dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi berdasarkan sistem informasi yang terintegrasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Tim Anggaran Pendapatan Daerah; 7. Sudah terbangun mekanisme komunikasi - Koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengimplementasikan program pembangunan yang telah direncanakan setiap periodik; 8. Pemerintah Provinsi menyusun rencana pengembangan kawasan industri sebagai bagian pembangunan perindustrian di Kaltim   Faktor pendorong secara Eksternal, meliputi:   1. Kesesuaian Arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan global yang bertujuan meningkatkan PDRB berdasarkan pemanfaatan potensi sumber daya alam berkelanjutan dan terbarukan 2. Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan produksi dan potensi sumber daya alam yang melimpah sehingga memungkinkan pengembangan ekonomi ke arah *economic green* 3. Kondusifitas daerah sebagai upaya mendatangkan iklim investasi yang besar di Kalimantan Timur 4. Keputusan penempatan lokasi Ibu kota negara yang baru dari pemerintah pusat merupakan salah satu pendorong kegiatan ekonomi di Kalimantan Timur 5. Keberadaan jalur laut dan pelabuhan ekspor di Kalimantan Timur mendorong pengembangan aktifitas produksi sumber daya alam 6. Peran masyarakat pedesaan di Kalimantan Timur yang kental nuansa budaya dan adat istiadat membantu dalam proses pembangunan secara berkelanjutan 7. Potensi keadaan alam di Kalimantan Timur yang sangat bervariasi mulai dari keanekaragaman hayati, hutan, sungai, danau, bukit, pegunungan hingga pesisir laut yang bisa menjadi obyek pariwisata andalan daerah 8. Adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan destinasi pariwisata di Kalimantan Timur | Faktor penghambat pencapaian sasaran 22:   1. Gagalnya |

* + 1. **Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat Capaian Kinerja Pembangunan Misi 4.**

Misi 4, terdapat 1 tujuan dan 3 sasaran yang hendak dicapai melalui 5 program yang dilaksanakan oleh 3 perangkat daerah. Satu tujuan tersebut yakni Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup. Adapun 3 sasaran sebagaimana dimaksud yakni *pertama*, Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK);  *kedua*, Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana; dan *ketiga*, Meningkatnya Kinerja Penyelengaraan Penataan Ruang.

Tiga perangkat daerah terkait yang terlibat dalam mewujudkan misi, tujuan dan sasaran tersebut yakni Dinas Lingkungan Hidup, Badan penanggulangan Bencana Daerah, dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat. Berkenaan dengan faktor pendorong dan penghambat capaian kinerja pembangunan misi 4 dapat terlihat pada Tabel di bawah ini:

| **Misi** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Faktor** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pendorong** | **Penghambat** |
| Misi 4: Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan | 1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | 1. Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) | 1. Adanya komitmen kepala daerah dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang berdaulat 2. Adanya regulasi yang mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup, terutama adanya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. Dukungan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 4. Penurunan kualitas lingkungan hidup terutama perubahan iklim menjadi isu global yang menjadi perhatian internasional maupun nasional. 5. Adanya peluang bantuan pusat maupun internasional dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup terutama yang berkaitan dengan penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) 6. Adanya kesadaran dan sinergitas pemangku kepentingan (stakeholders) baik pemerintah, swasta, akademisi, pemerhati dan komunitas lingkungan, dan masyarakat dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup | 1. Keterbatasan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup 2. Masih kurangnya SDM baik dari segi kuantitas ataupun kualitas dalam pengelolaan sumber daya alam 3. Keterbatasan database serta informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup 4. Belum optimalnya pengelolaan SDA dan lingkungan hidup terkait dengan minimnya anggaran |
|  |  | 1. Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana | 1. Tersedianya regulasi yang mendukung dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana 2. Adanya kemitraan antar *stakeholders* baik pemerintah, dunia usaha, lembaga usaha masyarakat, Forum Kaltim Peduli Bencana, dan kemitraan dari luar negeri dalam penanggulangan bencana 3. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Lembaga Legistatif dalam penanggulangan bencana 4. Adanya program prioritas desa tangguh bencana yang menjadi program unggulan | 1. Lemahnya Koordinasi baik internal dan eksternal di lingkungan SKPD termasuknya adanya ego sektoral 2. Belum lengkapnya standar operasional prosedur termasuk dalam pelaksanaannya 3. Terbatasnya SDM baik dari segi jumlah dan kemampuan individu dalam melaksanakan fungsi pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 4. Keterbatasan kapasitas dalam pelaksanaan tanggap darurat serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana 5. Dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkena dampak bencana, masih terdapat basis data yang tidak mutakhir dan reguler, tidak akuratnya penilaian kerusakan dan kerugian pasca panen, terbatasnya peta wilayah dalam menganalisa kerusakan parsial, dan alokasi pendanaan yang terbatas 6. Rendahnya kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana |
|  |  | 1. Meningkatnya Kinerja Penyelengaraan Penataan Ruang | 1. Tersedianya regulasi yang mendukung dalam penyelenggaraan penataan ruang 2. Adanya komitmen kepala daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang 3. Adanya dukungan anggaran baik dari pusat maupun daerah | 1. Masih adanya ketidaksesuaian Perda RTRW antara provinsi dengan kabupaten/kota terutama pada struktur dan pola ruang 2. Tidak optimalnya pengendalian dan pengawasan yang terstruktur, akurat, dan cepat akibat dari tidak lengkapnya Rencana Rinci Tata Ruang KSP yang berkekuatan hukum 3. Masih tingginya perubahan alih fungsi lahan dan inkonsistensi kebijakan terhadap rencana tata ruang 4. Partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi penetapan penataan ruang masih rendah |

* + 1. **Analisis Faktor Pendorong Capaian Kinerja Pembangunan Misi 5.**

Misi 5, terdapat 1 tujuan dan 3 sasaran yang hendak dicapai melalui 8 program yang dilaksanakan oleh 44 perangkat daerah. Satu tujuan tersebut yakni Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang berfsih, professional, dan berorientasi pelayanan publik. Adapun 3 sasaran sebagaimana dimaksud yakni *pertama*, Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efesien;  *kedua*, Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan public yang berkualitas; dan *ketiga*, Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Empat perangkat daerah terkait yang terlibat dalam mewujudkan misi, tujuan dan sasaran pada misi 5 yakni Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur. Berkenaan dengan faktor pendorong dan penghambat capaian kinerja pembangunan misi 5 dapat terlihat pada Tabel di bawah ini:

| **Misi** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Faktor** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pendorong** | **Penghambat** |
| Misi 5: Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih, Profesional, dan Berorientasi Pelayanan Publik | 1. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang berfsih, professional, dan berorientasi pelayanan publik | 1. Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efesien | faktor internal pendorong capaian kinerja pembangunan misi 5 meliputi:   1. Ketepatan dalam penentuan program, kegiatan serta indikatornya. Pada prinsipnya hampir seluruh program, kegiatan dan indikator pada misi 5 memiliki korelasi dengan ketercapaian sasaran tujuan dan misi pembangunan. Dalam satu perhitungan, diketahui bahwa ketepatan dalam mementukan suatu perhitungan pada akhirnya akan mendorong ketercapaian dari suatu tujuan yang hendak dicapai sepanjang program dan kegiatan tersebut dilaksanakan dengan baik. 2. Ketersedian dana. Anggaran yang mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan membuat tidak ada alasan bagi OPD terkait untuk merealisasikan capaian kinerja pembangunan misi 5. Hal ini membuat ketersediaan dana menjadi faktor pendorong capaian kinerja pembangunan misi 5. 3. Sumber Daya Manusia profesional yang tersedia di setiap perangkat daerah terkait; dan 4. Struktur organisasi yang proporsional di setiap perangkat daerah terkait sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan   Faktor eksternal pendorong capaian kinerja pembangunan misi 5 meliputi:   1. Kesedian instrumen-instrumen hukum yang mengikat untuk mewujudkan kinerja pembangunan. Diantara instrumen hukum sebagaimana dimaksud yakni:    1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.    2. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.    3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;    4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.    5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.    6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.    7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.    8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.    9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi.    10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).    11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. 2. Partisipasi publik (masyarakat). Bagaimanapun, keterlibatan publik tidak dapat dikesampingkan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. Tidak sedikit kini instrumen hukum yang memberi ruang bagi publik (masyarakat) untuk berpartisipasi dan menjadi bagian dari keberhasilan kerja-kerja pemerintah, baik dilevel pusat maupun daerah. Hal inilah yang seyogyanya harus disikapi secara bijak untuk kemudian mampu dikonversi sebagai faktor pendorong yang bersifat eksternal untuk mencapai kinerja pembangunan misi 5. | * 1. Sistem Evaluasi Intern Perangkat Daerah Belum Berjalan.   2. Sebagian Besar Perangkat Daerah Belum menyusun Cascading Kinerja.   3. Indikator Program dan Kegiatan belum inline dengan sasaran Renstra/ RPJMD   4. Masih dilakukan asistensi dan Evaluasi terhadap perangkat daerah.   5. Program perencanaan daerah belum diselaraskan dengan program perencanaan berbasis Geospasial berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017 dan Permendagri No.90 Tahun 2019   6. Perangkat Daerah masih menerapkan perencanaan berbasis “rutinitas” sehingga orientasi untuk program pembangunan dan peningkatan ekonomi belum terlihat sangat jelas |
|  |  | 1. Terwujudnya Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas | faktor internal pendorong capaian kinerja pembangunan misi 5 meliputi:   1. Ketepatan dalam penentuan program, kegiatan serta indikatornya. Pada prinsipnya hampir seluruh program, kegiatan dan indikator pada misi 5 memiliki korelasi dengan ketercapaian sasaran tujuan dan misi pembangunan. Dalam satu perhitungan, diketahui bahwa ketepatan dalam mementukan suatu perhitungan pada akhirnya akan mendorong ketercapaian dari suatu tujuan yang hendak dicapai sepanjang program dan kegiatan tersebut dilaksanakan dengan baik. 2. Ketersedian dana. Anggaran yang mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan membuat tidak ada alasan bagi OPD terkait untuk merealisasikan capaian kinerja pembangunan misi 5. Hal ini membuat ketersediaan dana menjadi faktor pendorong capaian kinerja pembangunan misi 5. 3. Sumber Daya Manusia profesional yang tersedia di setiap perangkat daerah terkait; dan 4. Struktur organisasi yang proporsional di setiap perangkat daerah terkait sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan   Faktor eksternal pendorong capaian kinerja pembangunan misi 5 meliputi:   1. Kesedian instrumen-instrumen hukum yang mengikat untuk mewujudkan kinerja pembangunan. Diantara instrumen hukum sebagaimana dimaksud yakni:    1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.    2. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.    3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;    4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.    5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.    6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.    7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.    8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.    9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi.    10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).    11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. 2. Partisipasi publik (masyarakat). Bagaimanapun, keterlibatan publik tidak dapat dikesampingkan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. Tidak sedikit kini instrumen hukum yang memberi ruang bagi publik (masyarakat) untuk berpartisipasi dan menjadi bagian dari keberhasilan kerja-kerja pemerintah, baik dilevel pusat maupun daerah. Hal inilah yang seyogyanya harus disikapi secara bijak untuk kemudian mampu dikonversi sebagai faktor pendorong yang bersifat eksternal untuk mencapai kinerja pembangunan misi 5. | * 1. Masih cukup banyak SOP perangkat daerah yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tidak dijabarkan secara komprehensif apa yang menjadi penghambat kenapa masih cukup banyak SOP perangkat daerah tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.   2. Belum tersosialisasi dokumen pelayanan public yang ada di setiap perangkat daerah   3. Setiap perangkat daerah mengadakan server dan membangun data center sendiri.   4. Belum tersedianya perangkat lunak untuk MOD ini yang tidak dikembangkan lagi.   5. Beberapa perangkat daerah melakukan Hosting lokasi yang berbeda-beda tidak dalam 1(satu) data center.   6. Target untuk interkoneksi melebihi realisasi dapat terwujud dengan anggaran pemerintahan yang memadai.   7. Sistem Informasi di setiap perangkat daerah yang berbeda membutuhkan web service/API.   8. Terdapat 2 kab/kota yang belum dapat menghadiri pelaksanaan asesmen penilaian.   9. Pada fase pembuatan, kendala yang dihadapi adalah kurangnya SDM yang menguasai teknologi *framework*, bisnis proses yang belum matang, koordinasi dengan *stakeholder* mengenai penggunaan aplikasi. Pada fase pengembangan kendala yang dihadapi adalah ketidaksesuaian bahasa pemrograman dari aplikasi sebelumnya dan perlu dilakukan normalisasi terhadapa basis data aplikasi.   10. Masih terdapat instansi pemerintah yang menggunakan subdomain diluar subdomain kaltimprov.go.id. |
|  |  | 1. Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel | faktor internal pendorong capaian kinerja pembangunan misi 5 meliputi:   1. Ketepatan dalam penentuan program, kegiatan serta indikatornya. Pada prinsipnya hampir seluruh program, kegiatan dan indikator pada misi 5 memiliki korelasi dengan ketercapaian sasaran tujuan dan misi pembangunan. Dalam satu perhitungan, diketahui bahwa ketepatan dalam mementukan suatu perhitungan pada akhirnya akan mendorong ketercapaian dari suatu tujuan yang hendak dicapai sepanjang program dan kegiatan tersebut dilaksanakan dengan baik. 2. Ketersedian dana. Anggaran yang mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan membuat tidak ada alasan bagi OPD terkait untuk merealisasikan capaian kinerja pembangunan misi 5. Hal ini membuat ketersediaan dana menjadi faktor pendorong capaian kinerja pembangunan misi 5. 3. Sumber Daya Manusia profesional yang tersedia di setiap perangkat daerah terkait; dan 4. Struktur organisasi yang proporsional di setiap perangkat daerah terkait sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan   Faktor eksternal pendorong capaian kinerja pembangunan misi 5 meliputi:   1. Kesedian instrumen-instrumen hukum yang mengikat untuk mewujudkan kinerja pembangunan. Diantara instrumen hukum sebagaimana dimaksud yakni:    1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.    2. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.    3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;    4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.    5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.    6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.    7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.    8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.    9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi.    10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).    11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. 2. Partisipasi publik (masyarakat). Bagaimanapun, keterlibatan publik tidak dapat dikesampingkan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. Tidak sedikit kini instrumen hukum yang memberi ruang bagi publik (masyarakat) untuk berpartisipasi dan menjadi bagian dari keberhasilan kerja-kerja pemerintah, baik dilevel pusat maupun daerah. Hal inilah yang seyogyanya harus disikapi secara bijak untuk kemudian mampu dikonversi sebagai faktor pendorong yang bersifat eksternal untuk mencapai kinerja pembangunan misi 5. | 1. Dari hasil penialaian oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur untuk disampaikan hasilnya ke BPKP Pusat, yang menjadi permasalahan dalam menuju Level 3 adalah dari 5 unsur penilaian ada 3 unsur masih dalam level 2. Ketiga unsur tersebut 1) Peran Layanan, yaitu Audit Kinerja dan Jasa Konsultasi. 2) Pengelolaan SDM, yaitu Koodinasi SDM, Pegawai Yang Profesional dan Membangun Tim dan Kompetensinya. 3) Praktek Profesional, yaitu: Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko dan KerangkaKerja Manajemen Kualitas. 2. Belum terintegrasinya dalam satu sistem informasi proses pengawasan internal antara Inspektorat, PPNS dan Pimpinan Pemerintah (Gubernur dan Wakil Gubernur) sebagai satu kesatuan pengawasan pegawai provinsi |